

MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) OLEH BADAN KERJASAMA ANTAR NAGARI (BKAN) DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Zaitul Ikhlas¹, Endry Martius², & Faidil Tanjung³

¹²³Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan, Program Pascasarjana,
Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: z.ikhlas73@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the management of the implementation of Women's Savings and Loans revolving funds and find the factors that cause the implementation of Women's Savings and Loans revolving funds by BKAN in Lembah Gumanti District to continue. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with key informants and triangulation informants. The results of this study indicate that the management functions consisting of planning, organizing, actuating and controlling have been carried out in accordance with operational standards and procedures (SOP) which are guided by the Solok Regent Regulation Number 26 Year 2016 concerning Protection and Preservation of the Results of the Activities of the Kecamatan Development Program and the Independent Rural Empowerment Community National Program in Solok Regency. The success factor for the SPP revolving fund is due to the use of the Grameen Bank principle, the existence of social capital and social control within the group.

Keywords: *Revolving Funds, Women's Loans and Savings, Management.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, yang meliputi berbagai dimensi untuk mewujudkan kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, modernisasi dan peningkatan kualitas manusia sebagai sumberdaya pembangunan (Rakhmad, 2013). Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan bahwa untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki pembangunan, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke

JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019

depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

Proses pembangunan dalam pelaksanaannya tidaklah semudah dalam penyebutannya. Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Menurut Siahaan (2001), masalah pembangunan merupakan jalinan dari masalah sosial, ekonomi, politik, administrasi dan sebagainya yang saling berpengaruh dan saling berkaitan satu sama lain. Masalah pembangunan yang sedemikian kompleks ini memerlukan analisis dari berbagai aspek, sehingga masalah dapat dipecahkan dengan pendekatan multidisiplin ilmu.

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang terus dihadapi di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Sumatra Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Mairizal (2015) menyebutkan bahwa pemerintah berfokus pada pembuatan dan pelaksanaan aturan kebijakan serta berusaha untuk menyusun berbagai program dan kebijakan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat seluruh Indonesia melalui dana Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN), bantuan dari pihak lembaga swasta maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Menurut Mairizal (2015), program tersebut belum menunjukkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek dalam seluruh proses kegiatan pembangunan, dalam arti lain masyarakat hanya menjadi objek dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan semua proses kegiatan peraturan dan kebijakan langsung dari pusat tanpa adanya aspirasi masyarakat dari bawah. Seiring dengan dinamika yang mengedepankan tingginya suatu proses demokrasi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat maka kepentingan rakyat harus didahulukan dari kepentingan lain. Hal ini menggiring kebijakan publik untuk berpihak pada kepentingan rakyat dan telah dimulai sejak

diberlakukannya sistem Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa masalah otonomi masyarakat harus lebih didekatkan pada pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat lebih diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan ini, melalui Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan yang di mulai pada Program Pengembangan Kecamatan (PKK), dimana jangkauan programnya yang berakhir pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2006 pemerintah menyepakati Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja sebagai lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK). Selanjutnya pada tahun 2007, Presiden menyempurnakan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk masyarakat daerah kabupaten, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan untuk masyarakat kota (PNPM) (Departemen Dalam Negeri, 2008).

Sumelung (2016), menemukan bahwa pelaksanaan program SPP ini di katakan belum berhasil dengan baik. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti dana yang menunggak di akibatkan oleh beberapa anggota yang tidak menyetor setiap bulan dan adanya pengurus yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor. Hal ini membuat pada perguliran berikutnya menjadi terhambat dan membuat tim pengelola menjadi kesulitan dalam mengelola dana tersebut.

Kecamatan Lembah Gumanti merupakan salah satu pilot proyek pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Solok. Melalui Peraturan Bupati Solok No. 26 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Solok, pengelolaan dana bergulir diserahkan ke kelembagaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) melalui Forum Musyawarah Antar Nagari (MAN). Modal awal BKAN Kecamatan Lembah Gumanti berasal dari hibah PNPM-MP dan dana lainnya. Status kepemilikan modal tersebut adalah milik masyarakat di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti. Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dalam membangun kemandirian masyarakat melalui bantuan dana bergulir sering tidak berhasil, karena masyarakat menanggapi bahwa dana bantuan dan hibah dari pemerintah tidak perlu dikembalikan. Sedangkan SPP yang dilaksanakan oleh BKAN Kecamatan Lembah Gumanti tetap berjalan dan berkembang yang ditandai dengan peningkatan dari jumlah pengguliran dana ini dapat dilihat perkembangannya dari tahun 2016 sebesar Rp. 2.564.000.000,-, tahun 2017 sebesar Rp. 2.902.000.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 3.125.000.000,-.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pelaksanaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh BKAN dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh BKAN di Kecamatan Lembah Gumanti tetap berjalan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang merupakan salah satu kecamatan yang ikut berpartisipasi dalam penerimaan program PNPM-MP dan pada saat ini dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Lembah Gumanti terdiri dari 4 (empat) nagari yaitu Nagari Alahan Panjang, Nagari Sungai Nanam, Nagari Salimpat dan Nagari Air Dingin.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif (Sugiyono, 2009). Informan dalam penelitian adalah Pengurus BKAN, Tim

Verifikasi, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kemudian untuk dapat menilai keabsahan data yang sudah diperoleh dari informan, peneliti menggunakan teknik triangulasi (Bungin, 2012).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dilakukan dalam beberapa periode waktu tertentu. Data yang diperoleh di lapangan diidentifikasi, diolah dan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan kajian yang telah diteliti sehingga dapat menjelaskan kondisi manajemen pelaksanaan penyaluran dana simpan Pinjam Perempuan (SPP).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh BKAN di Kecamatan Lembah Gumanti

Manajemen pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat dilihat dari fungsi manajemen yang digunakan yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pergerakan (*actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam sebuah organisasi agar dapat meraih tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien, organisasi harus melakukan perencanaan dengan baik. Perencanaan merupakan proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya. Fungsi perencanaan pada manajemen pelaksanaan dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) yang akan dijelaskan yaitu dilihat dari menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan, mengatur sumber-sumber yang diperlukan dan menentukan organisasi, metode dan prosedur. Penjelasan mengenai fungsi perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Fungsi Perencanaan pada Manajemen Pelaksanaan
Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

No	Perencanaan (<i>Planning</i>)	Keterangan
1	Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud atau tujuan	a. Penentuan tujuan program SPP direncanakan dalam Forum MAN yang berpedoman terhadap UU No. 6 Tahun 2014 b. Dalam pelaksanaan program ini terlihat adanya tujuan yang jelas yaitu memberikan permodalan dan meningkatkan pelayanan kepada rumah tangga miskin (RTM)
2	Mengatur sumber-sumber yang diperlukan	a. Sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu orang-orang yang akan menjadi pegawai atau pengurus BKAN beserta unit-unit pelaksanaannya (UPK, TV dan BP-UPK) b. Pengurus dalam pelaksana cukup 12 orang yaitu BKAN terdiri dari 3 (tiga) orang, UPK terdiri dari 3 (tiga) orang, TV terdiri dari 3 (tiga) orang dan BP-UPK terdiri dari 3 (tiga) orang c. Sumber pendanaan berasal dari hibah PKK dan dana PNPM-MPd
3	Menentukan organisasi, metode dan prosedur	a. Struktur organisasi yang bertujuan untuk mewedahi orang-orang yang bekerja sesuai bidangnya sehingga bisa menmencaapai tujuan bersama. Dalam mengelola program SPP diberikan tanggungjawab kepada UPK dan dibantu oleh seluruh bidang-bidang yang terkait seperti BP UPK, TV. b. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu program yaitu memberikan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan dari BKAN juga rutin melakukan kunjungan ke lapangan untuk melakukan pembinaan langsung terhadap kelompok SPP. c. Prosedur dalam menjalankan program SPP sudah jelas berdasarkan Standar Operasional Prosedural (SOP) masingmasing bidang sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan dan bidangnya.

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa, fungsi perencanaan program SPP telah dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program. Yang mana dapat dilihat dari penetapan tujuan yang jelas. Begitu juga dnegan rencana penetapan SDM yang terstruktur. Sumber-sumber yang diperlukan sudah terlihat jelas aktor-aktor yang melaksanakan program SPP ini walaupun

masih merasakan kurangnya tenaga kerja untuk melakukan pembinaan serta kurangnya dana yang berimbas terhadap antrian yang panjang pada pencairan dana terhadap kelompok SPP akan tetapi dari segi waktu pelaksanaan program SPP ini sudah jelas dan sudah ditentukan sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing. Begitu juga halnya dengan menentukan organisasi, metode dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan program SPP ini.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan tugas, wewenang dan tanggungjawab, sehingga organisasi dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan (*handyaningrat*). pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Dengan adanya pengorganisasian, tugas-tugas yang terdapat dalam organisasi dapat dibagi sesuai dengan kemampuan pegawai dan peluang untuk mencapai tujuan sangat besar. Fungsi pengorganisasian pada manajemen pelaksanaan dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) yang akan dijelaskan yaitu dilihat dari Penentuan kegiatan-kegiatan, Pengelompokan Kegiatan-kegiatan, Pendelegasian Wewenang, Peranan Perorangan. Fungsi pengorganisasian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Fungsi Pengorganisasian pada Manajemen Pelaksanaan
Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

No	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	Keterangan
1	Penentuan kegiatan-kegiatan	<p>a. Kegiatan Sosialisasi yaitu mensosialisasikan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perguliran dana, biasanya diadakan langsung ke jorong-jorong kelompok SPP.</p> <p>b. Kegiatan seleksi dilakukan untuk penilaian kelayakan usulan kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang akan menyerap dana bergulir agar dapat meminimalisir tingkat kemacetan.</p>

		c. Kegiatan penyaluran atau pencairan dana berdasarkan prosedur pencairan dana yang sudah ditetapkan
		d. Kegiatan pengembalian dana merupakan kegiatan pembayaran iuran atas pinjaman oleh kelompok SPP yang telah didanai. Dimana kelompok SPP akan memberikan angsuran bulanan kepada BKAN sesuai lama waktu pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya
2	Pengelompokan Kegiatan-kegiatan	Pengelompokan kegiatan dilakukan berdasarkan tupoksi masing-masing pelaksana. Dengan adanya pengelompokan kegiatan berdasarkan tupoksi masing-masing pelaksana kegiatan akan memudahkan mereka untuk menjalankan kegiatan.
3	Pendelegasian Wewenang	BKAN telah memberikan kewenangan yang jelas kepada masing-masing bidang untuk menjalankan kegiatan-kegiatan program SPP berdasarkan tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing bidang.
4	Peranan Perorangan	Dalam pelaksanaan program SPP peranan perorangan masing-masing bidang telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama antar Nagari (BKAN) Kecamatan Lembah Gumanti kabupaten Solok.

Pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa semua bidang memiliki peranan perorangan yang jelas dalam mencapai tujuan dari program SPP. Masing-masing bidang akan melaksanakan tugas mereka berdasarkan tupoksi yang telah diberikan, yang didalam tupoksi itu sendiri menyangkut dengan tujuan dari program SPP. Dengan jelasnya peranan perorangan masing-masing bidang akan memudahkan mereka untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengorganisasian yang telah dilakukan meliputi: penentuan kegiatan, pendelegasian wewenang dan peranan perorangan. Pada proses ini penentuan kegiatan yang dilakukan dengan jelas oleh BKAN. Terlihat dari penentuan kegiatan-kegiatan yang terstruktur yang sesuai dengan tujuan program. Pengelompokan kegiatan berdasarkan tupoksi yang dimiliki masing-masing bidang. Pendelegasian wewenang yang diberikan oleh ketua BKAN kepada ketua masing-masing

bidang dan dari ketua bidang kepada anggota bidang. Serta peranan perorangan yang telah ditetapkan secara jelas berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

c. Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan untuk mengawal dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam penelitian ini pergerakan dilihat dari koordinasi dan motivasi. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dana bergulir simpan pinjam perempuan perlu untuk dilakukan sebagai usaha menggerakkan anggota-anggota pengurus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Fungsi pergerakan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Fungsi Pergerakan pada Manajemen Pelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

No	Pergerakan (<i>Actuating</i>)	Keterangan
1	Koordinasi/Komunikasi	Dalam pergerakan organisasi BKAN melakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan seluruh pengurus. selanjutnya koordinasi yang dilakukan yaitu
2	Motivasi	<p>a. Setiap kelompok yang lancar dan disiplin dalam pembayaran akan mendapatkan penghargaan sebesar 50% dari jasa pinjaman pada akhir masa pinjaman.</p> <p>b. Setiap kelompok yang macet/menunggak mendapatka hukuman berupa tidak diperbolehkan untuk meminjam sebelum melunasi yang tertunggak</p>

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program SPP adanya dilakkan koordinasi berupa rapat sesama unit pengurus dana bergulir SPP dan juga MAN pada akhir tahun. Berikutnya kelompok SPP juga bisa mendapatkan penghargaan ataupun hukuman. Hal ini tergantung dari keseriusan kelompok

SPP dalam melakukan pengembalian dana. Adanya penghargaan akan memberikan stimulan bagi kelompok SPP lainnya, begitu juga dengan hukuman akan memberikan ketakutan bagi kelompok untuk terlambat dalam mengembalikan pinjaman.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan (Handyaningrat, 1983). Pengawasan dapat membantu pemimpin untuk melihat pencapaian perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan. Dengan pengawasan dapat melihat apakah semua sumberdaya organisasi telah digunakan dengan efektif dan efisien.

Dalam sebuah program pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melihat hasil pencapaian dari program. Untuk pencapaian hasil yang maksimal dalam program perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program dalam menggunakan sumberdaya dan dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawabnya.

Adapun pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara observasi atau pengamatan, pelaporan dan pembatasan wewenang. Fungsi manajemen pengawasan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Fungsi Pengawasan pada Manajemen Pelaksanaan
Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

No	Pengawasan (<i>Controlling</i>)	Keterangan
1	Observasi/Pengamatan	Ketua BKAN melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap semua bidang dan dilakukan secara tiba-tiba agar pegawai lebih giat untuk melaksanakan tupoksinya. Sedangkan BP UPK akan melakukan pengawasan terhadap UPK minimal 1 kali dalam sebulan untuk memantau apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK tidak menyimpang dari tujuan program SPP.

2	Pelaporan	Semua bidang yang terkait dalam pelaksanaan program SPP akan membuat laporan dan menyerahkannya kepada Camat, Wali Nagari dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
3	Pembatasan Wewenang	Anggota bidang dapat melakukan kinerjanya berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh ketua bidang.

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan hasil temuan dan hasil wawancara peneliti yang menunjukkan bahwa Semua bentuk pengawasan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh BKAN dalam menjalankan program SPP. Hal ini terlihat dari bentuk pengawasan observasi yang dilakukan secara tiba-tiba oleh atasan dan dilakukan secara menyeluruh. Begitu juga dengan halnya pengawasan dalam bentuk pelaporan yang telah dilakukan oleh masing-masing bidang yang terkait dalam pelaksanaan proram SPP termasuk laporan-laporan dari kelompok SPP setiap bulannya.

Sedangkan pengawasan dari pembatasan wewenang yang dilakukan dari atasan kepada bawahan dan belu ada terjadi penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-maisng bidang. Dari hasil analisis tentang penelitian manajemen pelaksanaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) di Kecamatan Lembah Gumanti menunjukkan bahwa pengurus sudah melakukan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan standar operasional dan proseduralnya (SOP).

2. Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh BKAN di Kecamatan Lembah Gumanti

Pelaksanaannya BKAN sudah menerapkan dan menjalankan fungsi manajemen secara terarah dan berkelanjutan. Sehingga dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) masih berjalan sampai saat ini. Peneliti menemukan faktor-faktor yang menyebabkan program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) masih berjalan sampai saat ini berdasarkan hasil wawancara

dari informan kunci terkait pembahasan sebelumnya mengenai manajemen pelaksanaan dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) oleh BKAN di Kecamatan Lembah Gumanti. berikut ini faktor-faktor keberhasilan dana bergulir siman pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Lembah Gumanti yaitu prinsip *Grameen Bank*, modal sosial dan kontrol sosial.

Dengan demikian hasil yang diperoleh dengan menerapkan prinsip yang memperhatikan dan memfokuskan program SPP untuk masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Sehingga masyarakat nantinya bisa mandiri dan memiliki ekonomi yang kuat dalam menjalani kehidupannya. Keberlanjutan program ini juga dapat dilihat dari surplus pada laporan tutup buku Badan Kerjasama antar Nagari (BKAN) Kecamatan Lembah Gumanti Tahunan Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 190.114.000.

D. KESIMPULAN

Manajemen pelaksanaan dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) oleh Badan kerjasama antar Nagari (BKAN) di Kecamatan Lembah Gumanti dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan BKAN sudah menerapkan dan menjalankan fungsi manajemen secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan standar operasional dan prosedural (SOP), yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh BKAN di Kecamatan Lembah Gumanti dikarenakan menggunakan prinsip *grameen bank*.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, D. F. E. U. P., No, J. G. P., & Barat, P. S. (2015). Analisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program Pnpm-Mp Di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Yulihardi. *Journal of Economic and Economic Education Vol, 3(2)*, 145-159.
- Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Presiden Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*.
- Mairizal, L. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman*.
- Peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Solok.
- Rakhmat. (2013). *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumelung, R. M. (2016). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Eksekutif*, 1(7).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.